

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hampir empat dasawarsa terakhir, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam sistem pendidikan nasional guna mencapai mutu pendidikan. Berbicara mutu bukan hanya hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. Akan tetapi berkaitan dengan berbagai macam dimensi pendidikan yang terkait diantara satu dan lainnya. Secara konseptual mutu pendidikan dapat diartikan sebagai “kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan berbagai macam potensi atau sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin”. (Suryadi, 1992 dalam Suryadi, 2009:197). Jika mutu pendidikan mengarah pada ketercapaian proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar, maka hasil yang diharapkan yakni adanya perubahan atau kompetensi dalam diri peserta didik setelah mengikuti pembelajaran.

Bagi seorang guru upaya mencapai kompetensi pembelajaran adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan sebagai bahagian dari mutu pendidikan. Guru yang tidak mengetahui kompetensi apa yang akan diperoleh peserta didik, maka guru telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan pembelajaran. Tipe guru seperti ini yang tentunya mengajar hanya dijadikan sebagai upaya melepas kewajiban, mengajar tidak memiliki harapan, orientasi, serta target atau tujuan yang ingin dicapai. Bila ini terjadi, maka akan menyebabkan peserta didik tidak mempunyai cita-cita, gairah, serta kebulatan tekad dalam belajar. Peserta didik yang berangkat dari rumah menuju

sekolahpun tanpa dibarengi dengan tujuan yang jelas dan pasti. Sehingga tidak sedikit peserta didik yang acuh, tidak memberikan perhatian, bahkan ada yang terlelap tidur ketika berlangsungnya pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan rendahnya sikap ketekunan belajar dalam diri peserta didik. Padahal prestasi yang lahir karena ketekunan dan kesungguhan akan menjadikan peserta didik menjadi masyarakat pembelajaryakni warga masyarakat yang menjadikan belajar sebagai kebutuhan pokok dalam hidupnya. Peserta didik yang telah menjadi masyarakat pembelajar akan mengetahui pentingnya belajar untuk masa depan. Untuk itu peran guru sangat berkontribusi dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga kompetensi di setiap mata pelajaran dapat tercapai.

Kompetensi bukan hanya menunjukkan pada kemampuan pengetahuan peserta didik semata, akan tetapi gambaran secara kategorial yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap mata pelajaran. Ketiga aspek ini sangat mempengaruhi peserta didik khususnya bagi kehidupan di masa mendatang. Karena keberhasilan peserta didik bukan hanya dipengaruhi oleh intelektualnya saja melainkan dipengaruhi oleh faktor psikososial (sikap) serta faktor keterampilan yang dimilikinya. Hal ini sebagai upaya menghasilkan peserta didik yang akan mampu berpikir secara utuh, kreatif, kritis serta matang sehingga akan mempengaruhi pola sikap, tindakan dan ucapan yang mencerminkan jatidiri sebaga manusia yang berkarakter.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui kurikulum 2013 mewajibkan setiap mata pelajaran untuk memperkuat sikap dan keterampilan peserta didik. Walaupun pada kurikulum sebelumnya aspek sikap dan keterampilan telah dimuat di dalam standar kompetensi maupun kompetensi dasar, akan tetapi proses pembelajaran masih menekankan pada

aspek pengetahuan (kognitif). Sedangkan aspek sikap dan keterampilan masih belum tersentuh khususnya dalam proses pembelajaran.

Dalam perspektif kewarganegaraan dikenal adanya tiga kompetensi yang perlu dimiliki seorang warganegara yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Ketiga kompetensi ini bersinergi secara bersamaan membangun kualitas peserta didik agar menjadi baik (*good*), cerdas (*smarth*) dan dapat diandalkan sebagai warga negara muda yang dewasa. Peserta didik yang cerdas dan berperilaku baik merupakan tujuan utama dari pendidikan. Dengan demikian tujuan ini merupakan menjadi misi suci dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Sekaitan dengan itu Rahmat, dkk (2009:5) menjelaskan secara aksiologi mata pelajaran PKn bertujuan “untuk pendewasaan peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara dan komponen bangsa Indonesia”. Salah satu indikator yang dapat ditunjukkan sebagai warga negara dewasa adalah kemampuan berbuat, bertindak dan bersikap berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan moral yang dimiliki. Kondisi ini harus diperkuat dengan sebuah “proses sistematis yang memungkinkan peserta didik untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri, dan hal inilah yang disebut dengan berpikir kritis.” (Jhonson, 2009: 185).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mensyaratkan setiap warga negara memiliki kemampuan berpikir kritis sebagai bagian dari proses belajar kognitif serta kecakapan warga negara (*civic skill*). Pengetahuan kewarganegaraan dan kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*) merupakan komponen yang paling esensial dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn).

Seorang warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya maka tidak hanya menguasai pengetahuan dasar saja akan tetapi harus didukung oleh

kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warganegara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. (dalam Budimansyah,2008:58).

Kemampuan berpikir kritis akan menggali potensi warga negara untuk menganalisis, mengevaluasi (mengkoreksi) dari berbagai bentuk hak dan kewajiban yang dilaksanakan maupun kemampuan menjelaskan dan menganalisis berbagai gejala dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara (khususnya pemerintah) apakah fungsi pemerintah yang dijalankan itu berjalan dengan baik atau tidak. Sekaitan dengan itu, PKn menurut Somantri (2001:299) dirumuskan sebagai berikut.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan berindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang mampu melatih peserta didik agar dapat berpikir kritis sebagai misi esensial PKn. Warga negara yang mampu berpikir kritis berarti mempersyaratkan kehidupan sivil yang demokratis guna mencapai tujuan demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ilmu politik kemampuan warganegara berpikir kritis upaya menempatkan seorang warganegara lebih cakap dalam kehidupan politik. Artinya warganegara tidak hanya sebagai penonton saja melainkan ikut merumuskan, menganalisis, mengevaluasi bahkan mengkaji berbagai kebijakan pemerintah.

Jika menghendaki warga negara memiliki kemampuan berpikir kritis, maka sejak dini harus didukung dengan proses pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk melaksanakan proses berpikir. Jika tidak maka peserta didik akan menjadi anak yang tidak percaya diri, malu bertanya, tidak mampi menganalisis, menyaring

informasi sampai mengambil keputusan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemampuan inilah yang sangat diharapkan bagi seorang warga negara sebagai masyarakat yang demokratis yang membutuhkan partisipasi yang bertanggung jawab, efektif dan ilmiah dalam proses politik dan dalam *civil society*. Karena kemampuan berpikir kritis pada dasarnya adalah berpikir untuk “1) membandingkan dan mempertentangkan berbagai gagasan; 2) memperbaiki dan memperhalus; 3) bertanya dan verifikasi; 4) menyaring, memilih, mendukung gagasan; 5) membuat keputusan dan pertimbangan; dan 6) menyediakan landasan untuk suatu tindakan”.(dalam Surya, 2015:123).

Sekaitan dengan itu, Standar Kompetensi Lulusan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945”. Dalam peraturan tersebut dijelaskan juga bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi;
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari keempat tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri di atas, maka tampak bahwa berpikir kritis merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu kegiatan belajar mengajar harus mendorong peserta didik memiliki kemampuan ini khususnya dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Bila kemampuan ini telah tercapai maka diharapkan peserta didik mampu berpartisipasi secara aktif dan penuh tanggung jawab serta dapat bertindak secara cerdas dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam dunia internasional yang tetap memperkuat nilai-nilai identitas nasional (*local genius*).

Akan tetapi bila dilihat secara implementatif maka masih banyak proses pembelajaran PKn di sekolah-sekolah yang belum mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran PKn yang selama ini dilaksanakan di SMP Swasta Yaspenhan-2 Medan. Terdapat beberapa indikator yang peneliti identifikasikan sebagai penyebab lemahnya pembelajaran PKn di SMP Yaspenhan-2 Medan, sehingga mempengaruhi kemampuan berpikir kritis peserta didiknya. Diantaranya adalah guru PKn terjebak dengan pola-pola pembelajaran konvensional yang didominasi oleh metode ceramah dan tanya jawab. Pembelajaran konvensional yang dilaksanakan oleh guru PKn di sekolah ini hanya dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik pada kognitif tingkat rendah. Dalam setiap proses pembelajaran peserta didik hanya sebatas memahami konsep yang diajarkan akan tetapi tidak mampu mengkaitkan, menganalisis, menyimpulkan, menilai dan mengevaluasi, serta mengambil keputusan dan sikap dari makna materi pembelajaran PKn yang disampaikan.

Lemahnya kemampuan berpikir kritis ini dapat dilihat pada saat pembelajaran PKn distandar kompetensi sebelumnya pada materi Hak Asasi Manusia. Melalui observasi awal yang dilakukan terhadap 51 orang peserta didik di dua kelas yang berbeda, dapat dilihat bahwa sekitar 10 orang atau 19,23% peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis lebih baik dengan ditunjukkan sikap berani mengemukakan pendapat (bertanya, berargumentasi, dan menjawab pertanyaan), serta mampu menganalisis dan menyimpulkan materi pembelajaran. Kemampuan ini pun tidak diikuti dengan keterampilan mensintesis, menyimpulkan, mengevaluasi sampai pada keterampilan mengambil keputusan. Selain peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis lebih baik, ternyata tidak sedikit peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah yakni sebanyak 42 orang atau 80,77%, dimana peserta didik hanya mampu mengetahui konsep PKn melalui hafalan tetapi tidak bisa menganalisis, mensintesis, menyimpulkan, mengambil keputusan dan mengkaitkan materi tersebut dengan kondisi nyata kehidupannya.

Selain guru terjebak pada pola pembelajaran konvensional, faktor lain yang menyebabkan lemahnya pembelajaran PKn yang ikut mempengaruhi kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah keterbatasan kemampuan guru dan peserta didik dalam mengakses, memanfaatkan dan menggunakan berbagai sumber dan media pembelajaran PKn. Buku pelajaran adalah sumber belajar satu-satunya yang dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik dalam belajar. Begitu juga dengan minimnya media pembelajaran PKn, yang diikuti dengan terbatasnya kreativitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran di sekolah ini. Menurut hemat peneliti, serta dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru PKn menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kreativitas guru dalam

mengembangkan sumber dan media belajar PKn adalah terbatasnya fasilitas belajar yang tersedia di sekolah. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari tidak tersedianya jaringan internet yang dapat digunakan untuk mengakses sumber-sumber belajar, tidak tersedianya LCD *projector*, laboratorium komputer yang tidak memadai serta kurang lengkapnya koleksi buku pembelajaran PKn yang tersedia di perpustakaan SMP Yaspenhan-2 Medan.

Berbagai faktor yang menjadi permasalahan pembelajaran PKn di atas menyebabkan belajar PKn lebih menekankan padapola-pola pembelajaran *kognitif based education*, sehingga mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar yang ditunjukkan dengan sikap acuh, cepat bosan, malas berpikir dan tidak kooperatif. Pembelajaran yang dilaksanakan tidak mampu menjadikan mata pelajaran PKn menjadi kuat (*powerfull*). Lebih lanjut Budimansyah dan Sapriya, (2012:3) mengemukakan “pembelajaran yang kuat adalah ditandai dengan ciri-ciri bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*) peserta didik dalam belajar”.

Jika proses pembelajaran dapat mengaktifkan peserta didik untuk belajar maka dengan sendirinya akan meningkatkan minatnya untuk belajar. Akan tetapi proses belajar yang tidak mampu mengaktifkan serta memberikan rangsangan, dan perhatian kepada peserta didik, maka akan mempengaruhi minatnya untuk belajar. Kondisi ini mengakibatkan terpecahnya konsentrasi dalam belajar. Dan inilah yang terjadi pada peserta didik di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan. Peneliti memahami bahwa tahapan-tahapan proses pembelajaran PKn yang dilaksanakan oleh guru di kelas cenderung tidak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menggali pemikiran yang lebih mendalam (berpikir kritis), ditambah dengan minat belajar peserta didik

yang heterogen yakni sebagian memiliki minat belajar yang tinggi akan tetapi tidak sedikit yang memiliki minat belajar yang sangat rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan gurudalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui penggunaan metode yang dapat merangsang peserta didik berpikir seperti halnya diskusi dan tanya jawab. Akan tetapi metode ini belum mampu melibatkan peserta didik secara merata untuk aktif belajar bahkan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Padahal peserta didik yang duduk di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah fase dimana terjadinya perkembangan kognitif untuk berpikir logis yang telah memasuki tahap peringkat *concrete operational* pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Fase peringkat *concrete operational* menurut Surya (2015:122) adalah “fase dimana anak telah dapat membuat pemikiran tentang situasi atau konkrit secara logis. Perkembangan kognitif pada fase ini memberikan kecakapan anak untuk berkenaan dengan konsep klasifikasi, hubungan dan kuantitas”. Untuk itu penggalian pemahaman peserta didik berkenaan dengan kemampuan menganalisis, menjelaskan sampai kemampuan mengambil keputusan harus dilaksanakan pada siswa di tingkat ini.

Berbagai teori dan pendapat para ahli telah menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dapat dibentuk melalui penggunaan berbagai model pembelajaran yang mampu mendukungnya. “Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir peserta didik (penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah adalah melalui penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau lebih dikenal dengan *problem based learning* (PBL)” (dalam Rusman, 2012:229).

Menurut Tan (2003), dalam Rusman, (2012:229) “Pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga dapat memperdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan”. Tahapan awal model ini dimulai dengan menghantarkan siswa belajar dari sejumlah permasalahan. Karena permasalahan yang merupakan kunci utama dari model ini maka Dewey (1933) dalam Komalasari, (2014:266) menegaskan bahwa :

Berpikir dimulai apabila seseorang dihadapkan pada sesuatu masalah (*perplexity*). Ia menghadapi sesuatu yang menghendaki adanya jalan keluar. Situasi yang menghendaki adanya jalan keluar tersebut, mengundang yang bersangkutan untuk memanfaatkan pengetahuan, pemahaman atau keterampilan yang sudah dimiliki. Untuk memanfaatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang sudah dimilikinya terjadi suatu proses tertentu di otaknya sehingga ia mampu menemukan sesuatu yang tepat dan sesuai untuk digunakan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Dengan demikian yang bersangkutan melakukan proses yang dinamakan berpikir.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh, Komalasari (2014:58) bahwa “strategi pembelajaran menggunakan masalah dunia nyata merupakan satu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran”. Karakteristik pembelajaran PKn selalu mengkaitkan materi pada permasalahan bangsa dan negara serta kehidupan nyata peserta didik. Bila pembelajaran PKn menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), maka dapat dikatakan bahwa strategi ini sangat sesuai untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Karena pada dasarnya “Setiap orang dapat belajar berpikir dengan kritis karena otak manusia secara konstan berusaha memahami pengalaman”. (dalam Jhonson, 2014:191). Dengan demikian kemampuan berpikir kritis anak dapat dilatih dan

dikembangkan. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jindrich (2005) dalam Panjaitan, (2011:495) bahwa “kecerdasan anak banyak berkembang melalui aktivitas-aktivitas, seperti : pemecahan masalah dan penalaran, pembentukan konsep, peniruan/memori, atau asosiasi dan klasifikasi”.

Sekaitan dengan itu, “Peserta didik yang berusaha memecahkan masalah biasanya telah menentukan hasil apa yang diinginkan dari awal”. (dalam Jhonson, 2014:203). Hasil yang diinginkan bisa berupa prestasi belajar, pujian, hadiah (*reward*), penghargaan, perubahan sikap dan keterampilan, serta hasil-hasil lainnya. Untuk mencapai berbagai keinginan ini tentunya harus didukung oleh minat belajar yang tinggi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Karena tanpa minat belajar sudah dipastikan sebaik apapun strategi pembelajaran yang dilaksanakan, tidak akan mempengaruhi hasil belajarnya termasuk kemampuan berpikir kritis.

Pembelajaran yang menantang dapat meningkatkan respon peserta didik untuk belajar. Seorang guru yang mampu melibatkan peserta didik agar ikut terlibat aktif dalam belajar, maka akan memungkinkan timbulnya minat belajar peserta didik. Pendapat ini kemudian diperkuat oleh Santrock (2004:530) bahwa “motivasi dan kinerja murid mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi guru”. Untuk itu seorang guru diharapkan memiliki ekspektasi terhadap minat setiap peserta didik baik yang memiliki minat rendah, sedang maupun tinggi sehingga ada rasa percaya diri dalam diri peserta didik untuk melaksanakan berbagai tahapan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

Guru Pendidikan Kewarganegaraan dituntut agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Karena berpikir kritis merupakan bahagian dari tujuan PKn yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai warganegara

muda. Kemampuan berpikir kritis hanya dapat dikembangkan jika pembelajaran dapat melibatkan peserta didik untuk belajar. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Panjaitan (2011:492) bahwa “keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran memberi sumbangan sangat besar dalam membangun dan mengembangkan prakarsa, kreativitas dan berpikir kritis peserta didik, yang pada akhirnya mampu menyiapkan lulusan untuk hidup dalam masyarakat secara mandiri, cerdas, dan kompetitif”.

Dari pendapat di atas serta didukung oleh latar belakang permasalahan, khususnya fakta empirik berkaitan dengan lemahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas VII di SMP Yaspenhan-2 Medan, maka hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti melaksanakan penelitian ini. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran *problem based learning* (PBL) dan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik sehingga menyebabkan proses pembelajaran PKn berjalan pasif. Kondisi ini dapat terlihat dimana masih banyak peserta didik yang tidak berani bertanya dan menjawab pertanyaan, takut menyampaikan gagasan dan menyanggah gagasan orang lain, serta tidak mampu menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh guru. Hal ini menyebabkan lemahnya kemampuan peserta didik dalam

mengevaluasi, mengambil keputusan (jalan keluar) serta menyimpulkan hasil pembelajaran PKn pada saat itu. Sehingga tidak jarang setelah pembelajaran PKn selesai tidak tampak ada perubahan sikap dan kemampuan berpikir peserta didik.

2. Kurangnya pemanfaatan media dan sumber pembelajaran PKn sehingga mempengaruhi minat belajar peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan hanya sebatas gambar seperti gambar pahlawan atau gambar contoh kasus yang ada dibuku pegangan peserta didik.
3. Penggunaan model dan metode pembelajaran yang cenderung *respository* (konvensional). Metode pembelajaran yang digunakan hanya sebatas ceramah plus yakni ceramah, diskusi dan tanya jawab. Guru jarang bahkan tidak pernah menggunakan model pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik seperti pembelajaran dengan pendekatan berbasis masalah melalui penggunaan model *problem based learning*(PBL).
4. Kondisi di atas mempengaruhi minat belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dimana masih ada peserta didik yang tidak fokus atau kurang memberikan perhatian pada guru di kelas, sering permissi atau keluar masuk kelas bahkan tidak sedikit peserta didik yang “menguap”bahkan ngantuk saat berlangsungnya pembelajaran.
5. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai sehingga tidak mendukung proses pembelajaran.Fasilitas tersebut berupa perpustakaan yang tidak memadai, tidak tersedianya infokus (*LCD Projector*) serta peralatan elektronik yang mendukung pembelajaran (seperti TV, komputer, tape dll) serta tidak didukungnya jaringan internet yang dapat digunakan untuk mengakses sumber/informasi pembelajaran lainnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah penelitian di atas, serta didukung dari latar belakang masalah, maka perlu kiranya membatasi pokok masalah penting dalam penelitian ini mengingat keterbatasan waktu penelitian. Untuk itu, penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) serta pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis yang ditinjau dari minat belajar peserta didik yakni minat belajar tinggi dan minat belajar rendah di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kemampuan berpikir kritis peserta didik yang menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) lebih tinggi dibandingkan dengan belajar secara konvensional di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan?
2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi yang diajarkan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan kelompok peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi yang diajarkan dengan menggunakan model konvensional di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan?
3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok peserta didik yang memiliki minat belajar rendah yang diajarkan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan kelompok peserta didik yang memiliki minat belajar rendah yang diajarkan dengan menggunakan model konvensional di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan?

4. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kritis di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik yang menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang belajar secara konvensional di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan.
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang diajarkan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan kelompok siswa yang memiliki minat belajar tinggi yang diajarkan dengan menggunakan model konvensional di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan?
3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang memiliki minat belajar rendah yang diajarkan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan kelompok siswa yang memiliki minat belajar rendah yang diajarkan dengan menggunakan model konvensional di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan?
4. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kritis di kelas VII SMP Yaspenhan-2 Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagai bahagian dari penelitian kuasi eksperimen, maka penelitian ini diharapkan menjadi contoh serta sumbang pemikiran yang bermanfaat untuk seluruh praktisi pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) berkenaan penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning*(PBL) dan pengaruh minat belajar terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran PKn. Untuk itu peneliti mencoba menggambarkan manfaat penelitian baik secara praktis maupun secara teoritis.

Secara Praktis

1. Sebagai sumbang pemikiran guna meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional pendidik melalui penggunaan model dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, inovatif, dan kreatif.
2. Sebagai upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Hal ini sangatlah sejalan dengan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan bagi warga negara muda (*the young citizen*).
3. Sebagai bentuk implementasi pemikiran peneliti untuk mengaplikasikan wawasan dan keilmuan di Pendidikan Dasar guna melaksanakan pembelajaran PKn yang lebih inovatif sehingga PKn menjadi pembelajaran yang lebih bermakna, menantang, mengasyikkan bagi peserta didik.

Secara Teoritis

Penelitian ini mencoba mengkonstruksi antara model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penggabungan keduanya diharapkan menjadi sumbang pemikiran yang bermanfaat khususnya secara teoritis bagi para praktisi pendidikan. Selain itu penelitian

ini juga diharapkan mampu menjadi landasan pemikiran pendidik dalam menentukan langkah, strategi, model, dan metode apa yang paling tepat digunakan pada pembelajaran PKn sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang tentunya mempengaruhi mutu pendidikan yang lebih baik.



THE
Character Building
UNIVERSITY